

**RESTRUKTURISASI PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA: PENERAPAN TEORI ESENSIALISME DI INDONESIA**Helaluddin[✉]**Article Information****Article History:**

Accepted May 2018

Approved June 2018

Published July 2018

Keywords:*Essentialism, education, literacy, cultural-based learning***How to Cite:**

Helaluddin (2018). Restrukturisasi Pendidikan Berbasis Budaya: Penerapan Teori Esensialisme di Indonesia: Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Vol 6 No 2: Halaman 74-82.

Abstrak

Berbagai riset dan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih berada dalam zona merah. Berbagai permasalahan pendidikan tersebut seolah-olah menjadi hal yang begitu sulit untuk ditanggulangi. Rendahnya tingkat literasi dan pemeringkatan pendidikan yang berada di posisi terbawah merupakan indikator tentang rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Esensialisme sebagai salah satu teori pendidikan menawarkan berbagai pandangan dalam mengembalikan esensi pendidikan yang sebenarnya. Pengutamaan mata pelajaran pokok seperti membaca, menulis, dan matematika diyakini akan menjadi modal dasar bagi siswa menuju masa depannya. Teori ini juga menekankan pentingnya pendidikan yang disandarkan pada sesuatu yang telah teruji keampuhannya, yaitu kebudayaan pada masa lampau. Aliran ini juga mengkritisi kurikulum yang dikembangkan dengan sifat fleksibilitas. Kurikulum yang disusun dengan asas fleksibilitas dipandang akan menjadi dasar yang mudah goyah dan tidak menentu. Pemberlakuan kebijakan gerakan literasi nasional, penguatan materi pelajaran dasar, dan pemberlakuan pendidikan budaya merupakan tiga hal yang ditawarkan dalam artikel ini sebagai bagian dari implementasi dari teori esensialisme.

Abstract

Many researches show that the education in Indonesia is still in the red zone. Many obstacles of education is complexity to overcome. The low level of literacy and the low rank of education are indicators of the low quality of education in Indonesia. Essentialism is one of the education theories which offers the various perspectives to regenerate the truly essential education. By promoting the basic subjects such as reading, writing, and mathematics are intended to be fundamental for the students toward their future. This theory put emphasis on the importance of education which had already been qualified that is culture of the past. This theory also criticizes the developed curriculum based on flexibility. Developing curriculum based on the flexibility leads to be unsatble and inapproriate principles. The enforcement of the national literacy policy, the strengthening of basic subjects, and the enforcement of cultural education are parts of the implementation of the essentialism theory which are provided in this article.

© 2018 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

[✉] Alamat korespondensi:

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

E-mail: helaluddin@uinbanten.ac.id

ISSN 2303-3800 (Online)

ISSN 2527-7049 (Print)

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu tema perbincangan yang tidak akan habis dibahas. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan sebuah negara. Semua lini dan bidang selalu terkait dengan pendidikan. Ibarat kata, pendidikan merupakan sesuatu yang menarik, seksi, dan banyak menyita perhatian publik. Kemunduran atau stagnasi sebuah negara sangat mungkin dikaitkan dengan faktor bahwa tingkat pendidikan di suatu negara tersebut yang masih terbelakang.

Dewasa ini, pendidikan menemui tantangan yang cukup berat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi bagai pedang bermata dua yang pada satu sisi mendatangkan kemudahan namun pada sisi yang lain menawarkan bisa yang mematikan. Kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh teknologi saat ini justru malah menciptakan pribadi-pribadi yang mengganggalkan masalah. Bahkan, produk teknologi yang digadang-gadang sebagai produk kemajuan ini mengarahkan peserta didik pada situasi yang membentuk kepribadian yang apatis dan egois.

Kegagalan pendidikan di Indonesia (kalau boleh dikatakan demikian), sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kondisi sosial budaya juga mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Pola dan kebiasaan masyarakat yang bersikap pragmatik cenderung membuat masyarakatnya berpikir tidak kritis. Sebagai contoh, masyarakat di Indonesia cenderung menyukai hak-hal yang bersifat praktis dan visual daripada menyukai kegiatan membaca. Hal inilah yang ditasbihkan sebagai cikal bakal kemunduran atau stagnasi pendidikan di Indonesia.

Data hasil riset yang menyatakan rendahnya tingkat literasi di Indonesia dilansir oleh *Central Connecticut State University* pada Bulan Maret 2016. Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara dalam pemeringkatan literasi internasional. Yang lebih menyedihkan, saat Indonesia menjadi tamu kehormatan di Jerman dalam *Pameran Buku Internasional Frankfurt* tahun

2015 silam. Ada salah satu tulisan di media massa Jerman yang menulis bahwa "Indonesia adalah negeri tanpa pembaca". Hal ini didasarkan pada data statistik jumlah buku karya sastra dan jumlah pembacanya (Damshauser: 2016).

Data yang sama terkait dengan literasi di Indonesia adalah tulisan yang dimuat dalam *Harian Kompas* pada bulan Agustus 2016. Dalam salah satu artikelnya tercantum: *UNESCO melaporkan pada tahun 2012 kemampuan membaca anak-anak Eropa dalam setahun rata-rata menghabiskan 25 buku, sedangkan di Indonesia mencapai titik terendah, yaitu 0% (tepatnya 0,001%). Artinya, dari 1000 anak-anak di Indonesia, hanya 1 anak yang mampu menghabiskan satu buah buku dalam setahun.* Sungguh sangat menyedihkan!

Tidak hanya masalah literasi yang menjadi indikator ketidakberhasilan pendidikan di negara kita. Ada beberapa riset dan hasil studi yang dikemukakan oleh berbagai lembaga internasional yang menunjukkan bukti yang sama. Salah satu hasil riset yang cukup bergengsi dalam pendidikan adalah PISA (*Programme for International Student Assessment*). PISA merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) atau Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Data terakhir pada tahun 2015, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-69 yang jauh tertinggal dari Singapura yang berada pada peringkat ke-1.

Tantangan dalam dunia pendidikan semakin berat dengan semakin derasnya gempuran budaya luar dan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Pendidikan di Indonesia seolah kehilangan jati dirinya karena terlampau banyak mengadopsi budaya luar. Tradisi dan budaya lokal yang seharusnya menjadi penciri bagi bangsa Indonesia makin tenggelam dan digantikan dengan produk budaya luar. Meski sudah banyak yang melontarkan pemikiran tentang *thinking globally acting locally*, namun tetap saja krisis identitas masih terus melanda bangsa kita. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan selayaknya memposisikan diri

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sebuah peradaban.

Pemahaman keliru tentang urgensi pendidikan di masyarakat juga harus segera dijernihkan. Terkait dengan masalah kecerdasan misalnya, sebagian masyarakat cenderung *memaksa* anak-anaknya untuk menguasai satu bidang yang mungkin tidak sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya. Pendidikan berkualitas hanya dipandang sebatas ranking atau pemeringkatan dan tingginya nilai mata pelajaran tertentu, seperti matematika, fisika, kimia, dan lain-lainnya. Orang tua, bahkan guru sekalipun masih memandang sebelah mata pada anak-anak yang memiliki ketertarikan pada bidang seni, kinestetik, interpersonal, dan sebagainya. Para orang tua berupaya memaksa anak-anaknya untuk menguasai mata pelajaran yang dikehendakinya dengan dalih untuk kesuksesan di masa depannya kelak.

Pemahaman yang menempatkan kecerdasan sebagai pelabelan angka atau numerik melalui tes IQ harus segera diredefinisi. Hal ini didasarkan pada kajian bahwa kecerdasan pada anak akan terus berkembang dan tidak akan diketahui kapan akan mencapai puncaknya. J.K. Rowling misalnya, Ia mencapai puncak kecerdasannya saat menuangkan ide *gilanya* dalam Novel *Harry Potter* justru pada usia yang tidak muda lagi. Menurut Chatib (2012) kecerdasan tidak dapat diukur dengan angka-angka karena: (1) kecerdasan tidak dibatasi oleh tes formal, (2) kecerdasan itu multidimensi, dan (3) kecerdasan merupakan proses *discovering ability* atau proses kemampuan menemukan.

Dengan berbagai kendala dan permasalahan pendidikan di atas, sudah seharusnya Indonesia segera merestrukturisasi pendidikannya. Tindakan ini harus segera dilakukan agar kualitas dan tingkat pendidikan di Indonesia semakin membaik. Ada hal-hal mendasar yang harus diterapkan dalam pendidikan di Indonesia, salah satunya dengan penerapan teori esensialisme dalam pendidikan. Pandangan ini berupaya untuk menekankan pendidikan dasar dengan kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Aliran ini juga

mengedepankan budaya masa lalu yang telah teruji keampuhannya untuk diterapkan kembali dalam sistem pendidikan.

Artikel ini memaparkan tentang teori esensialisme dan praktik penerapannya yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Secara spesifik, ada beberapa hal yang dianalisis dalam artikel ini, yaitu: (1) permasalahan pendidikan saat ini, (2) aliran esensialisme dalam pendidikan, dan (3) kebijakan dan strategi dalam menangani permasalahan pendidikan.

PEMBAHASAN

Permasalahan Pendidikan

1) *Minimnya Kemampuan Literasi*

Dengan melihat jabaran pada bagian pendahuluan di atas, dapat ditemukan berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini. Bagi penulis, hal mendasar yang menyebabkan tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah adalah minimnya kemampuan literasi. Literasi merupakan pondasi penting yang harus dikembangkan semenjak di sekolah dasar. Kemampuan literasi di Indonesia memang harus terus dipupuk mengingat masyarakat kita yang lebih tertarik pada kebiasaan melihat dan mendengar. Masyarakat kita cenderung mengutamakan kegiatan menonton (visual dan audio) daripada membiasakan diri untuk membaca.

Para ahli sependapat bahwa faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat literasi di Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor seperti tingginya tingkat *drop out* anak sekolah, kemiskinan, dan pengangguran. Lebih lanjut, Amariana dikutip Kharizmi (2015) menyebutkan ada faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kemampuan literasi di Indonesia, yaitu faktor intelegensi, jenis kelamin, perkembangan motorik, kondisi fisik, kesehatan fisik, lingkungan, perbedaan status sosial, dan keluarga (keterlibatan orang tua).

Rendahnya minat baca yang merupakan cikal bakal dalam minat menulis perlu segera diantisipasi. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Sarwiji (2015) kemampuan membaca cepat anak di Indonesia hanya mencapai rerata 144 kata per menit. Indikator

ini menunjukkan bahwa minat membaca di Indonesia masih sangat minim. Mereka lebih tertarik untuk menghabiskan waktunya untuk ber-media sosial, seperti *facebook*, *instagram*, *tweeter*, *path*, dan lain-lainnya.

2) Gempuran Modernisasi dan Sistem Informasi Digital

Tidak dapat diragukan lagi, kemajuan teknologi berkembang sangat luar biasa. Hal ini tentu berdampak serius bagi dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Berbagai produk teknologi telah menjadi sumber informasi, sumber rujukan, wahana, dan laboratorium tempat berbagai orang bertemu dan berinteraksi. Namun kondisi ini justru menimbulkan berbagai persoalan baru bagi dunia pendidikan. Menurut Karsidi (2017) capaian kemajuan teknologi saat ini justru menciptakan pribadi yang soliter dan apatis. Di samping itu juga, berbagai masalah seperti *gap* kemiskinan yang semakin jauh, ketimpangan sosial, dekadensi moral yang kian akut diyakini merupakan efek dari kemajuan teknologi.

Dewasa ini, kebudayaan memasuki *an ever-moving era* atau zaman yang serba bergerak. Pada zaman ini, nilai-nilai kearifan hidup yang dianggap adiluhung dan agung sering dimaknai secara sinis sebagai narasi usang yang perlu dirombak total. Masyarakat lebih menyukai gaya hidup yang serba cepat, praktis, dan instan daripada berlaku hidup yang berpanjang-panjang dalam proses dan berliku. Lebih tragis lagi, masyarakat semakin sulit mencari kebenaran sebuah informasi. Saat ini, kita lebih banyak diberondong dengan informasi yang sangat jauh dari fakta dan sikap objektif.

Lebih jauh, masyarakat kita saat ini tidak menyadari adanya ekspansi budaya luar yang terus menekan dan berupaya untuk mengganti identitas budaya sendiri. Mereka melakukannya dengan cara membiaskan atau mengaburkan nilai-nilai budaya lokal dan menggantikannya dengan bangunan budaya baru. Spirit sejarah bangsa dan legenda lokal sengaja diganti dengan mitos-mitos *post-modern* yang membunuh nilai karakter dan makna.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah meningkatnya angka

kriminalitas di Indonesia yang justru banyak dilakukan oleh anak-anak usia sekolah. Berbagai tindakan anarkis seperti perkelahian, tawuran, tindak kekerasan guru kepada siswa dan sebaliknya justru menjadi ironi di zaman yang serba digital ini. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa, pendidikan yang selama ini dijalankan belum menyentuh *core* atau inti dari makna pendidikan itu sendiri. Ada berbagai perombakan yang harus dilakukan dalam menanganani krisis pendidikan saat ini.

Permasalahan lain yang tak kalah pelik adalah adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi di sekolah. Kesalahan ini cenderung dipahami sebagai suatu kewajaran. Menurut Diana Ravith dalam bukunya berjudul *Left Back: A Century of Failed School Reforms* (dalam Gutek: 2004) menyatakan ada beberapa kesalahan di sekolah selama ini. Tiga kesalahan besar tersebut adalah: (1) kepercayaan bahwa sekolah harus diharapkan mengatasi semua masalah sosial, (2) kepercayaan bahwa ada porsi kebutuhan anak-anak untuk mengakses pendidikan berkualitas tinggi, dan (3) kepercayaan bahwa sekolah harus membatasi pengalaman siswa dengan segera dan meminimalisasi atau bahkan menghindari transfer pengetahuan.

Aliran Esensialisme dalam Pendidikan

Esensialisme adalah teori pendidikan yang menginginkan agar landasan yang digunakan dalam sistem pendidikan adalah hal-hal yang bersifat esensial. Hal-hal yang bersifat esensial tersebut adalah teruji oleh waktu, bersifat menuntun, dan telah turun temurun dari zaman ke zaman (Hafid: 2015). Lebih lanjut, Hafid (2015) menyatakan bahwa Esensialisme menghendaki agar landasan pendidikan berakar dari nilai-nilai yang esensial, yaitu yang telah teruji oleh waktu, bersifat menuntun dan telah turun-temurun dari zaman ke zaman, dengan mengambil zaman *renaissance* sebagai permulaan. Pandangan esensialisme dalam pendidikan Islam dianggap sesuai karena tujuan umum paham esensialisme adalah membentuk pribadi bahagia dunia dan akhirat. Isi pendidikannya ditetapkan berdasarkan kepentingan efektifitas

pembinaan kepribadian yang mencakup ilmu pengetahuan yang harus dikuasai dalam kehidupan dan mampu menggerakkan keinginan manusia.

Esensialisme muncul sebagai reaksi tentangan terhadap berbagai permasalahan pendidikan yang bersifat fleksibel. Menurut para esensialis, kurikulum pendidikan yang mudah berubah-ubah akan menjadi mudah goyah dan tidak konsisten. Teori ini beranggapan bahwa hal terbaik yang harus dijadikan landasan dalam pendidikan adalah kembali ke budaya lama yang sudah teruji keberadaannya. Ada beberapa kelebihan dalam teori esensialisme, yaitu: (1) membantu untuk mengembalikan *subject matter* ke dalam proses pendidikan dan (2) perubahan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial (Thaib: 2015).

Teori esensialisme merupakan gabungan dari filsafat idealisme dan realisme. Kedua aliran tersebut bersifat elektik, artinya kedua aliran tersebut saling mendukung antara satu dengan yang lain, tidak melebur menjadi satu atau saling menghilangkan identitas dan ciri masing-masing. Berkaitan dengan kurikulum, teori esensialisme menekankan kurikulum yang berpusat pada *subject mater* atau mata pelajaran dan berpangkal pada landasan ideal yang kuat (Yunus: 2016). Mata pelajaran yang ditekankan pada aliran ini adalah 3R (*writing, reading, and aritmetika*). Kajian lain yang juga difokuskan pada aliran esensialisme adalah kesenian, ilmu pengetahuan, dan segala hal yang mampu menggerakkan kehendak manusia agar bahagia di dunia dan akhirat.

Terlepas dari anggapan bahwa teori esensialisme sebagai teori yang tradisional atau konservatif, namun pada kenyataannya teori ini banyak melahirkan kesuksesan dalam pendidikan. Ada beberapa hal yang menjadi prinsip-prinsip filsafat esensialisme, yaitu: (1) pendidikan harus menekankan pada pentingnya disiplin, (2) inisiatif dalam pendidikan harus dimiliki oleh guru bukan pada siswanya, (3) inti dari proses pendidikan adalah asimiliasi dari *subject matter* yang telah ditentukan, (4) sekolah harus mempertahankan metode-metode

tradisional yang berkaitan dengan disiplin mental, dan (5) tujuan akhir dari pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum (Khobir dikutip Abas: 2015).

Sebagai indikasi awal, esensialisme sebagai teori pendidikan cenderung fokus pada hal-hal yang spesifik. Artinya, sekolah sebagai agen sosiokultural yang memiliki peran utama dalam pendidikan akademik dan formal bagi siswa dalam menentukan kemampuan yang penting dan mata pelajaran (Gutek: 2004). Sekolah sebagai sebuah agen transmisi budaya yang melewati kemampuan esensial dan mata pelajaran sebagai warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya (mengabadikan peradaban). Dengan kata lain, esensialisme memiliki pandangan bahwa pendidikan sebagai upaya dalam memelihara kebudayaan.

Paham ini menginginkan manusia untuk kembali ke kebudayaan lama yang telah sukses dalam catatan sejarah membuktikan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia. Para esensialis memandang kebudayaan modern saat ini mengandung gejala-gejala penyimpangan dari kebudayaan masa lalu (Thaib: 2015). Esensialisme menolak orientasi liberal dan progresif yang menyatakan bahwa sekolah sebagai institusi multifungsi yang menunjukkan variasi sosial, politik, ekonomi, dan peran terapeutik secara psikologis. Bagi para pakar esensialisme, banyak sekolah dan guru mengalihkan ke non-akademik, waktu yang sedikit, uang, dan sumber daya yang akan diperoleh mereka untuk menunjukkan fungsi akademik utama.

Para esensialis secara tegas mendukung kurikulum materi pelajaran yang dibedakan dan diatur sesuai dengan prinsip logis atau prinsip kronologis internal mereka. Dengan kata lain, mereka meragukan istilah *inovatif* atau pendekatan proses dalam pembelajaran (konstruktivisme). Proses ini memposisikan siswa untuk mengonstruksi dan membuat pengetahuan mereka sendiri secara kolaboratif. Para ahli esensialisme berpendapat bahwa orang-orang berbudaya atau beradab akan belajar secara efektif dan efisien dengan menggunakan pengetahuan yang telah dikembangkan dan disusun oleh para ahli dan pakar lainnya.

Dalam esensialisme, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia hanya untuk menemukan pengetahuan yang sudah diketahuinya. Kurikulum yang mengabaikan masa lampau, menolak mata pelajaran yang dibatasi, dan membanggakan dirinya menjadi interdisipliner atau transdisipliner, pada kenyataannya menyebabkan kebingungan dalam pendidikan. Senada dengan pernyataan tersebut, Yunus (2016) menyatakan bahwa aliran esensialisme memandang pendidikan yang bertumpu pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuknya akan menjadikannya berubah-ubah, tidak konsisten, dan tidak terarah.

Para ahli esensialisme percaya bahwa instruksi dalam mata pelajaran dan keterampilan tertentu ditentukan secara luas oleh logika internal pada mata pelajaran atau keterampilan (Gutek: 2004). Dengan kata lain, ada perintah untuk diamati dalam pembelajaran sesuatu. Sebagai contoh, pengajaran sejarah Amerika yang mengikuti urutan kronologis sebagai berikut: (1) pertemuan antara penduduk asli Amerika dan Eropa, (2) kedudukan penduduk Eropa, (3) perang revolusi dan perjuangan untuk kemerdekaan, (4) periode nasional awal, (5) gerakan perbatasan barat, (6) perang sipil dan rekonstruksi, (7) industrialisasi dan imigrasi, (8) gerakan progresif, (9) perang dunia I, (10) masa tertekan, (11) perang dunia II, (12) perang dingin, dan (13) pasca perang dingin. Keberurutan berarti juga bahwa dalam instruksi untuk mata pelajaran tertentu diorganisasikan berdasarkan urutan kompleksitas, abstraksi, dan tingkat kesulitannya. Sebagai contoh, instruksi dalam pelajaran matematika dimulai dengan penghitungan aritmetika dasar, beranjak ke aljabar, selanjutnya ke materi geometri, dan berlanjut ke materi kalkulus dan trigonometri. Prinsip keruntutan berarti bahwa keterampilan dan materi pelajaran dipikirkan berdasarkan penentuan prosedur dan tidak perlu berdasarkan apa yang disukai oleh para siswa saat ini.

Dalam pandangan esensialisme, sekolah dan guru perlu tetap fokus dan bertahan pada tugas utama serta tidak dialihkan ke ranah nonakademik. Ketika para esensialis memiliki kepercayaan tentang

ekonomi dan politiknya sendiri, mereka cenderung mempercayai bahwa sekolah seharusnya tidak digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat. Di saat masalah dapat dieksplorasi pada istilah sub-mata pelajaran yang relevan dengan para siswa, sekolah seharusnya tidak menumpangkan atau mempromosikan politik tertentu, sosial, dan agenda ideologi ekonomi di dalamnya. Mereka seharusnya tidak menggunakan sekolah sebagai agensi indoktrinasi politik. Lebih lanjut, para esensialis tidak mempercayai bahwa sekolah memiliki *power* untuk mengatasi masalah sosial dan penyakit masyarakat. Apa yang sekolah dapat lakukan adalah mengajar siswa-siswa tentang keterampilan dasar dan mata pelajaran yang akan dipersiapkan untuk menangani problem sosial, politik, dan ekonomi di masa akan datang. Para esensialis mengkritik para ahli teori kritis yang menyatakan bahwa para esensialis mengklaim ketidakberpihakan politik itu adalah omong kosong atau palsu. Pertanyaan yang sebenarnya adalah bukan pada ketidakberpihakan tetapi siapa yang akan mengontrol pembuatan kurikulumnya.

Kebijakan dan Strategi Pendidikan

Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pendidikan tersebut. *Pertama*, menyikapi tentang kemampuan literasi di Indonesia, tentu semua pihak harus segera berbenah untuk memperbaikinya. Masalah literasi ini memang tidak hanya dialami oleh Indonesia saja tetapi juga berbagai negara mengalaminya. Tengok saja Amerika Serikat pada dekade 90an yang sempat terjadi perdebatan besar di parlemen lokal Texas. Debat ini dilakukan dalam menyikapi rendahnya kemampuan literasi masyarakat Texas pada masa itu. Akhirnya, pada masa pemerintahan Clinton, diadakan program *America Read Challenge* setelah ditemukan fakta bahwa banyak anak SD yang belum lancar membaca. Demikian halnya di negara Inggris yang mengalami kondisi serupa. Banyak kawula muda dan orang-orang dewasa yang memiliki minat rendah terhadap literasi. Akhirnya pemerintah Inggris

menggalakkan kampanye *National Literacy Trust* dalam mempromosikan budaya literasi. Apa yang dilakukan oleh Indonesia saat ini? Sebenarnya pemerintah telah berupaya untuk mengkampanyekan gerakan literasi sekolah beberapa waktu lalu. Gerakan literasi sekolah (GLS) merupakan gerakan membaca di seluruh sekolah selama 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Topik atau tema bacaan yang dibaca oleh para siswa dibebaskan dan lebih diarahkan pada karya sastra. Namun gerakan ini juga belum menunjukkan *trend* positif dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa. Ada beberapa hal yang dapat ditempuh dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi di Indonesia, antara lain:

1. Menggunakan strategi pembelajaran dalam menarik minat baca tulis bagi peserta didik, salah satunya dengan menggunakan model *literature based*. Model ini merupakan bentuk pendekatan *whole language* yang berupaya mengintegrasikan antara keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis (Silvia & Djuanda: 2017).
2. Melakukan hal-hal berikut: (1) memperbaiki kualitas dan pemerataan pendidikan agar mendorong tingkat *melek* huruf di Indonesia, (2) membangun lebih banyak perpustakaan di seluruh daerah, (3) menerapkan program-program berkelanjutan dalam meningkatkan minat baca-tulis, (4) mendorong para penerbit untuk menerbitkan lebih banyak buku, dan (5) saling bersinergi antar masyarakat, lembaga, dan pemerintah dalam membangun peradaban membaca dan menulis (Permatasari: 2015).

Kedua, pemerintah perlu memprioritaskan pengajaran pada kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan matematika. Alangkah lebih baik jika mulai dari tingkat sekolah dasar, siswa sudah diperkenalkan dengan budaya membaca mulai dari membaca sastra klasik hingga tulisan-tulisan populer. Sebagai contoh, pemerintah dapat menerapkan kebijakan terkait kegiatan membaca dengan setengah hari membaca dan tidak terikat hanya 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Situasi

dalam menunjang kegiatan membaca juga harus dikondisikan, seperti bebas membaca di mana saja tanpa dibatasi pada ruang kelas. Sebagai langkah awal dalam meningkatkan minat membaca, siswa-siswa dapat diarahkan ke literasi karya sastra. Berkaitan dengan karya sastra, budaya literasi di kalangan peserta didik juga masih minim. Salah satu studi atau penelitian yang menguatkan anggapan tersebut adalah hasil yang dipaparkan oleh Taufik Ismail pada tahun 1997. Beliau menjabarkan bahwa peserta didik untuk level sekolah menengah atas telah membaca 0—2 buku sastra saja. Bila dibandingkan dengan negara lain tentu kita tertinggal jauh. Sebagai contoh, Malaysia mewajibkan siswa membaca 6 judul karya sastra, Swiss dan Jepang 15 judul, dan Amerika Serikat 32 judul. Dengan demikian, pemerintah dapat menerapkan kebijakan tentang penargetan bagi siswa-siswa dalam membaca karya sastra mulai dari level sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Pertanyaannya, mengapa harus karya sastra diperkenalkan secara dini kepada para siswa? Karya sastra merupakan produk budaya yang harus diperkenalkan kepada siswa-siswa. Ada banyak manfaat dari mempelajari karya sastra. Salah satu manfaat karya sastra adalah pembentukan karakter. Menurut Noor (2011: 51-52) ada beberapa manfaat dongeng (karya sastra) bagi anak-anak. Menurutnya ada enam manfaat dongeng yaitu: (1) mengajarkan nilai moral yang baik, (2) mengembangkan daya imajinasi anak, (3) menambah wawasan, (4) meningkatkan kreativitas, (5) mendekatkan anak-anak dengan orang tua, dan (6) menghilangkan ketegangan atau stres.

Di sisi lain, karya sastra dapat berfungsi sebagai media katarsis. Hal ini dikuatkan oleh filsuf terkenal Aristoteles yang menyebut sastra sebagai media pembersih jiwa bagi penulis dan pembaca. Mengapa demikian? Bagi pembaca karya sastra (bersifat reseptif), setelah membaca karya sastra perasaan dan pikiran terbuka karena mendapatkan pengetahuan dan hiburan. Sebaliknya bagi penulis, setelah menghasilkan karya sastra jiwanya akan mengalami pembersihan, lapang, dan terbuka karena telah mengungkapkan dan

menuangkan ide dan perasaannya dalam produk sastra tersebut (Helaluddin: 2016).

Ketiga, pendidikan seharusnya mensinergikan tiga kecerdasan dalam proses pembelajarannya, yaitu kecerdasan intelegensi (IQ), kecerdasan emosional ((EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ). Jika ketiga kecerdasan tersebut dikelola dengan baik maka akan berpotensi membangun kecerdasan sosial (SocQ). Kecerdasan sosial penting peranannya dalam membentengi diri terhadap perubahan dan gempuran budaya luar yang destruktif. Intinya, dalam kurikulum pendidikan seharusnya berlandaskan pada budaya bangsa. Hal ini penting untuk dipahami karena budaya sendiri memberikan nilai-nilai positif dalam menghadapi modernisasi.

Bangsa yang unggul adalah bangsa yang memiliki kecerdasan budaya dengan ditandai oleh kemampuan mengelola nilai-nilai kebajikan tradisi. Kecerdasan budaya bukan bermakna mengusung budaya lama untuk diterapkan pada masa kini, melainkan mengelola nilai-nilai budaya lama sebagai aset kebangsaan (Karsidi: 2017).

Intinya, kurikulum pendidikan harus berbasis dengan budaya bangsa. Pendidikan berbasis budaya adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional yang diperkaya dengan keunggulan kooperatif dan kompetitif berdasarkan nilai-nilai budaya luhur agar siswa secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, dan tanggap terhadap perubahan dunia (Marfuah: 2016).

SIMPULAN

Berbagai permasalahan dalam pendidikan di Indonesia, mulai dari minimnya kemampuan literasi hingga merosotnya kualitas pendidikan dapat diantisipasi dengan menerapkan teori esensialisme dalam sistem pendidikan di Indonesia. Penerapan teori ini tidak secara menyeluruh tetapi dengan memilih bagian-bagian tertentu yang dianggap mendesak. Hal yang mendesak tersebut antara lain penekanan pada pembelajaran mata pelajaran membaca, menulis, matematika, seni, dan budaya.

Terkait dengan gempuran produk-produk teknologi, pendidikan seharusnya menempatkan sekolah sebagai lembaga yang tak tergantung pada teknologi. Perkembangan teknologi memang harus dikuasai oleh sekolah, namun pada hakikatnya teknologi tidak dapat menggantikan posisi sekolah sebagai lembaga pendidikan. Sekolah harus mampu memacu dirinya agar dapat bersaing dalam merebut perhatian para siswa dari *gadget*, televisi, media sosial, dan produk teknologi informasi lainnya. Agar sekolah tidak kehilangan ruhnya sebagai lembaga pendidikan, sudah selayaknya pendidikan dibangun dengan berlandaskan budaya adiluhung yang telah teruji keandalannya dalam menembus zaman.

Hal mendesak yang harus dilakukan sekolah adalah menegaskan kembali tanggung jawab utamanya untuk pengembangan kecerdasan generasi muda dan karakternya. Sekolah harus melakukan lebih jauh dari hanya sekadar mengajar tentang *how to learn* dan *how to look things up*. Sekolah harus mampu mengajarkan pada siswa tentang pengetahuan yang bernilai, bagaimana menggunakan pengetahuan, bagaimana mengorganisasikan apa yang mereka tahu, bagaimana memahami hubungan masa lalu dan masa sekarang, bagaimana menyampaikan perbedaan informasi akurat dan propaganda, dan bagaimana mengambil informasi menjadi pemahaman.

DAFTAR RUJUKAN

- Abas, E. 2015. Asas Filosofi Teori Belajar Esensialisme dan Implikasinya dalam Pembelajaran. *Jurnal Lentera*, 2, 103–120.
- Chatib, M. 2012. *Sekolahnya Manusia: Sekolah Berbasis Multiple Intelligences di Indonesia*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Damshauser, B. 2016. Belajar Dunia pada Teks. Dalam *Seminar Internasional Riksa Bahasa X*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
- Gutek, G. L. 2004. *Philosophical and Ideological Voices in Education*. New York: Pearson.

- Hafid, S. A. 2015. Pemikiran Esensialisme, Eksistensialisme, Perennialisme, dan Pragmatisme dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal al-Asas*, 3(1), 165–178.
- Helaluddin, H. 2016. Penguatan Karakter Peserta Didik melalui Budaya Literasi Karya Sastra. Dalam *Seminar Internasional Riksa Bahasa X*. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.
- Karsidi, R. 2017. Pendidikan Berbasis Budaya menuju Keunggulan Bangsa (hlm. 1–17). Dipresentasikan pada *Seminar International Character Development in the 21st Century Education*, Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta.
- Kharizmi, M. 2015. Kesulitan Siswa Sekolah Dasar dalam Meningkatkan Literasi. *Jurnal Jupendas*, 2(2), 11–21.
- Marfuah, S. 2016. Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya di SMA Negeri 11 Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 5(7), 743–752.
- Noor, R. M. 2011. *Pendidikan Karakter Berbasis Sastra*. Yogyakarta: Ar-ruz Media.
- Permatasari, A. 2015. Membangun Kualitas Bangsa dengan Budaya Literasi (hlm. 146–156). Dipresentasikan pada *Seminar Nasional Bulan Bahasa 2015*, Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Sarwiji, S. 2015. Peran Bahasa Indonesia dalam Pengembangan Budaya Literasi untuk Mewujudkan Bangsa yang Unggul dalam Konteks masyarakat Ekonomi Asean. Dalam *Seminar nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Bandung: STKIP Siliwangi.
- Silvia, O. W., & Djuanda, D. 2017. Model Literature Based dalam Program gerakan Literasi sekolah. *Jurnal Mimbar Sekolah Dasar*, 4(2), 160–171.
- Thaib, M. I. 2015. Esensialisme dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *Jurnal Mudarrisuna*, 4(2), 731–762.
- Yunus, H. A. 2016. Telaah Aliran Pendidikan Progresivisme dan Esensialisme dalam Perspektif Filsafat Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 2(1), 29–39.